

## JUDUL &amp; RINGKASAN

Judul : Efektivitas Pemerintahan Desa  
dalam Pengelolaan Pembangunan  
Desa

Peneliti : Priyatmoko

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga

Sumber beaya : DPP Universitas Airlangga

Permasalahan pembangunan pedesaan, karena posisi strategiknya dalam rangka pembangunan nasional, merupakan amanat yang menuntut kepedulian mendalam banyak pihak. Kelangkaan sumber-sumber, keterbatasan penguasaan teknologi, serta terbatasnya akses ke sistem produksi maupun ke sistem kekuasaan menyebabkan persoalan kemiskinan pedesaan sudah merupakan persoalan pelik yang tak mudah dipecahkan. Kepelikan persoalan ini bertambah lagi karena tiadanya institusi pembangunan pedesaan yang kapabilitasnya dapat diandalkan. Pemerintahan lokal, khususnya Pemerintahan Desa yang karena sebab-sebab tertentu harus merangkap sebagai institusi pembangunan juga masih memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam hal pemahaman pejabatnya akan sifat multidimensional persoalan pembangunan, serta kemampuannya menseleksi program yang strategis. Campur-tangan pemerintahan supra desa di satu pihak diundang, karena sangat dibutuhkan, di lain pihak karena sifatnya terlalu politis justru menimbulkan ketegangan dan permasalahan baru.

## ABSTRAK PENELITIAN

Judul : Efektivitas Pemerintahan Desa  
dalam Pengelolaan Pembangunan  
Desa

Peneliti : Priyatmoko

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sumber beaya : DPP Universitas Airlangga ta-  
hun 1987/1988

Perkembangan pembangunan kini telah kian lanjut, meluas dan mendalam. Tujuan-tujuan proses pembangunan kian bersegi banyak (multi-purpose processes). Tali-temali antara aspek yang satu dengan aspek yang lain, antara perubahan yang satu dengan perubahan yang lain senantiasa perlu dicermati dengan tekun, rajin, teliti, dan bersinambing, mengingat tali-temali tersebut jangkauan kuantitatif dan kualitatif kian rumit. Perubahan tertentu di satu bidang dapat mempunyai dampak yang luas di berbagai bidang, yang seringkali tidak dapat diduga, diperhitungkan, atau direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, secara jujur harus diakui bahwa segenap proses pembangunan tersebut sebenarnya merupakan jalinan tali-temali fungsional yang cukup rumit untuk dapat dimengerti, dicermati, dan dimanipulasi atau dikendalikan.

Dalam perkembangan demikian itu setiap pengabdian  
pembangunan ..

pembangunan -- baik yang bekerja pada tingkat perancangan dan perencanaan maupun pelaksana dan pekerja teknis di lapangan perlu dibekali wawasan yang multi-disipliner sifatnya, menerabas batas-batas kerutinan pekerjaan masing-masing. Para penyusun kebijaksanaan pembangunan umumnya sangat bergantung pada pengabdipengabdipembangunan di lapangan, terutama mengenai ketepatan gambaran realitas sosial di mana kebijaksanaannya akan diterapkan serta dampak-dampak, positif maupun negatif, yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan yang telah dibuatnya. Laporan dari lapangan adalah kekuasaan para pengabdipembangunan di lapangan.

Dalam pada itu terasa betapa pentingnya peran institusi penyelenggara pembangunan desa. Dari hasil kerjanya diharapkan proses perubahan pembangunan desa dapat berlangsung terarah dan terkendali secara terpadu. Karena alasan, antara lain efisiensi dan untuk menghindari dualisme administrasi pembangunan, pemerintahan desa sekaligus berfungsi sebagai institusi penyelenggara pembangunan desa. Ada beberapa masalah yang timbul dalam pencangkakan fungsi baru ini. Dan, masalah-masalah ini cukup jelas dirasakan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Rawan yang dijadikan daerah penelitian ini. Sebagian masalah tersebut timbul karena aparat pemerintahan desa umumnya tidak direkrut dan dipersiapkan secara khusus untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan. Yang terjadi kemudian, tugas-tugas pembangunan diintegrasikan dalam tugas-tugas rutinnnya, yang

dasar ...

dasar-dasar filosofis dan karakternya agak berbeda dengan tradisi kekuasaan yang selama ini telah berkembang. Hubungan kekuasaan pada hirarkhi pokoknya seringkali berakibat pada ketidakberanian mereka untuk menyusun laporan secara jujur. Legitimasi kekuasaan barangkali berbeda dasarnya dibanding dengan tuntutan pembangunan. Lebih dari itu, persaingan-persaingan politik yang melibatkan jajaran birokrasi pemerintahan sebagai salah satu pemain utamanya, menjadikan persoalan pembangunan sangat politis sifatnya.

Politisasi proses pembangunan desa, sekurang-kurangnya dapat menggeser prinsip-prinsip dan ukuran-ukuran manajemen di bawah prioritas-prioritas politik. Dalam hal terjadi pertentangan politik, maka pemborosan pembangunan tak dapat dielakkan, karena pertentangan politik akan menjadi indetik dengan pertentangan pembangunan. Partisipasi dan keswadayaan pembangunan seolah-olah telah berubah menjadi semacam "oposisi pembangunan".